



WADUL: Penyedia skutik saat melakukan aduan ke LBH Jogjakarta beberapa waktu lalu.

Keberadaan Penyedia Skutik Perlu Dicermati

Bisa Tetap Beroperasi, Bersinergi dengan Kampung Wisata

JOGJA, Radar Jogja - Susanto Dwi Antoro, Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja sebut pihaknya telah beradansi dengan aliansi skuter listrik (skutik) Jogja. Menurutnya, diperlukan pemerhatian kaitannya dengan bagaimana penyedia skutik tetap dapat mencari nafkah. "Ini warga Kota Jogja, mengals rezeki di kotanya sendiri," Iontarnya diwawancara di kompleks Balai Kota Jogja Timoho Kamis (18/8). Politisi PDIP ini pun menilai, skutik merupakan bagian dari

pengayaan materi terkait ekonomi kreatif. Pelarangan terhadap operasinya di kawasan Sumbu Filosofis pun, harus dicarikan alternatif. "Harapan kami, Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Jogja bisa merangkul mereka untuk bisa bersinergi dengan 18 kampung wisata," ujarnya. Dikatakan pula, Kota Gudug memiliki destinasi yang dikelola oleh swasta. Hal ini dapat menjadi celah bagi penyedia skutik, untuk tetap dapat beroperasi. "Bagaimana mereka dipertemukan dulu," sebutnya.

Namun, Antoro tidak permasalahan terkait dengan larangan operasional skutik di kawasan Sumbu Filosofis oleh Gubernur DJJ Hamengku Buwono X. Sebab

skema pelarangan dimaksudkan sebagai persiapan realisasi pedestrian, jalur kunjungan penilaian dari UNESCO untuk menjadikan wilayah ini sebagai warisan budaya. "Kita sama-sama mendaratkan pada skema Yogya nge-yogyan. Kita harus menciptakan solusi yang solutif," ujarnya.

Antoro lantas membeberkan, informasi yang diterima bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ akan menjalankan program becak listrik. Kemudian dikatakan, kota-kota besar juga telah mengakomodasi kendaraan listrik.

"Skutik juga harus ambil peran. Tapi bagaimana kita akan membuat satu regulasi, menciptakan kawasan yang memang dikhusus-

kan untuk kawan-kawan pelaku ekonomi di bidang skutik," tegasnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Kota Jogja Yeti Martanti mengatakan, peraturan wali kota (perwal) yang mengatur tentang skutik belum terbit. Perwal masih dalam uji materi untuk diselarsakan dengan aturan di atasnya.

"Artinya, kalau membuat peraturan harus diselarsakan dengan aturan di atasnya. Itu yang terpenting," ujarnya.

Terkait harapan, Yeti menyinggung koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja. Namun dipastikan, ada beberapa kajian yang diperlukan untuk menerbitkan perwal. (fat/eno/bv)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005